

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
HASIL TEMUAN PENGAWASAN OLEH HAWASBID
TRIWULAN II
PERIODE BULAN APRIL S/D JUNI 2023



PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I.A
TAHUN 2023



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
HASIL TEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I.A
TRIWULAN II
PERIODE APRIL S/D JUNI TAHUN 2023**

Berdasarkan Laporan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima Kelas I.A Triwulan II (Periode April s/d Juni 2023) tertanggal 27 Juni 2023, setelah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi (MONEV) pada tanggal 27 Juni 2023, maka berikut diuraikan hal-hal yang harus segera ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan terhadap hasil-hasil temuan tersebut beserta cara perbaikannya adalah sebagai berikut:

I. MANAJEMEN PERADILAN:

1. Pelaksanaan Tatakelola Manajemen Peradilan;

Temuan:

Kekurangan jumlah Hakim dan semakin meningkatnya jumlah perkara menyebabkan hakim melaksanakan sidang hampir setiap hari dan kerja sampai malam.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Pengajuan Ijin Hakim Tunggal ke Mahkamah Agung RI.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Ketua PA Bima).

2. Pelaksanaan Tatakelola Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;

Temuan:

Banner Role Model belum dibuat dan dipasang di gedung Pengadilan Agama Bima, meskipun sudah ada SK Role Modelnya.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera diselesaikan pencetakan dan pemasangan Banner Role Model Tahun 2023

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Wakil Ketua PA Bima selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas).

II. KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Kinerja Penjaga Keamanan

Temuan:

Penjaga keamanan masih kurang tegas terhadap keluar masuknya para pihak dan sering kehilangan Id card para pihak.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Sering diadakan DDTK untuk meningkatkan profesionalisme keamanan.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Sekretaris dan Panitera berkoordinasi dengan Bagian Umum dan Keuangan).

2. Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang Menunjang Pelayanan Publik;

Temuan:

Kurang lengkapnya brosur persyaratan dari seluruh jenis perkara

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Brosur di meja Informasi dan Layanan PTSP lainnya untuk dilengkapi

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Keuangan).

III. ADMINISTRASI PERKARA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Pelaksanaan tatakelola Prosedur penerimaan perkara.

Temuan:

Ditemukan masih ada lampiran surat Permohonan belum ditandatangani salah satu pihak (Pemohon II) No. Perkara 192/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 21 Februari 2022.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Sebelum perkara didaftarkan, petugas wajib meneliti kelengkapan berkas dan juga membuat lis kelengkapan dan memberi tanda kelengkapan berkas pada list.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Muda Permohonan dan Petugas Penerimaan Perkara).

Temuan:

Tidak lengkapnya persyaratan permohonan Dispensasi Kawin di berkas, namun sudah didaftarkan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Melengkapi Formulir Syarat Permohonan DK di meja Informasi dan Pendaftaran PTSP dan melaksanakan DDTK ke Petugas PTSP.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Muda Permohonan dan Petugas Penerimaan Perkara).

2. Pelaksanaan tata kelola pencatatan dan pengarsipan dokumen administrasi penerimaan perkara pada layanan Meja Penerimaan (PTSP), baik yang bersifat manual maupun yang dilakukan melalui elektronik dalam aplikasi SIPP;

Temuan:

Terjadi dua kali penginputan data perkara.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Petugas IT segera mengintegrasikan SIPP dengan Posbakum.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera melalui Jusrita/Jusrita Pengganti perkara tersebut).

3. Pelaksanaan tata kelola pengarsipan perkara, baik yang dilakukan secara manual maupun aplikasi SIPP dan e-Court

Temuan:

Perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bm sudah BHT dan dilaksanakan isi putusannya, namun belum dilakukan pengarsipan/belum diarsipkan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera dilakukan pengarsipan terhadap Berkas perkara tersebut.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Muda Hukum dan Petugas Arsip).

IV. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Pelaksanaan tata kelola minutasi dan apload dokumen perkara dalam aplikasi SIPP

Temuan:

Perkara Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Bm sudah putus tetapi dokumen BAS di SIPP ada yang belum diinput;

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera dilengkapi apload dokumen BAS perkara tersebut di SIPP (Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Pengganti dan Ketua Majelis perkara tersebut).

2. Kelengkapan Berkas Perkara Sidang

Temuan:

Perkara Nomor 465/Pdr.G/2022/PA/Bm sudah diminutasi dan diarsipkan, namun ada dokumen Mediasi yang belum ditandatangani oleh Mediator.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera melengkapai tandatangan dokumen dari berkas tersebut
(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Pengganti perkara tersebut dan Ketua Pengadilan).

V. BIDANG ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

A. Bidang Kepegawaian dan ORTALA

1. Kelengkapan Data Pegawai dalam Aplikasi SIKEP

Temuan:

Terdapat kekurangan kelengkapan data pegawai a.n Feriman, A.Md pada SIKEP, yaitu pada bagian jabatan salah satu pegawai, nomor SPMT, SPP dan SPMJ belum di input.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Operator SIKEP harus lebih teliti dalam memukhtahirkan data.
(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Kasubbag Kepegawaian dan Operator SIKEP).

B. Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan

1. Pengisian Laporan Monev BAPENAS dan SMART Kemenkeu

Temuan:

Belum mengisi Laporan Monitoring, Pemantauan dan Evaluasi melalui Aplikasi e-Monev Bapenas/SMART

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Operator harus tepat waktu dalam memukhtahirkan data.
(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Kasubbag TI melalui Staf Pelaksana).

C. Bidang Umum dan Keuangan

1. Inventaris Barang Milik Negara

Temuan:

Masih ada beberapa Barang Milik Negara yang belum dilabelisasi;

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan control keadaan BMN secara rutin tiap awal minggu kerja. (Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Kasubbag Umum).

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Temuan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Bima Kelas I.A Triwulan II Periode Maret s/d Juni 2023 ini disusun. Terhadap berbagai temuan yang dilakukan MONEV di atas dan direkomendasikan untuk segera dilakukan tindak lanjut perbaikan, maka kepada seluruh pihak-pihak (Pejabat) yang terkait harus segera menindak lanjuti dengan melakukan perbaikan dalam waktu paling lama (paling lambat) 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan MONEV ini dibuat.

Semoga laporan ini dapat dijadikan bahan periksa untuk pelaksanaan kegiatan dan program Pengadilan Agama Bima selanjutnya.

Bima, 27 Juni 2023

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima



H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

NIP. 196904171999031003

BAB II
HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN

Meliputi sub kinerja:

- a. Pelaksanaan Tatakelola Manajemen Peradilan;
- b. Program Kerja dan Pencapaian Target Indikator Kinerja;
- c. Pelaksanaan Tatakelola Program Akreditasi Penjaminan Mutu;
- d. Pelaksanaan Tatakelola Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
- e. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan manajemen peradilan
- f. Pengawasan dan Pembinaannya;
- g. Tindaklanjut Evaluasi dan Hambatan Pelaksanaannya;

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Kekurangan jumlah Hakim dan semakin meningkatnya jumlah perkara menyebabkan	Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan	Kurangnya jumlah hakim sementara penerimaan perkara banyak	Pengadilan Agama Bima diberi izin untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal	Pengajuan Ijin Hakim Tunggal ke Mahkamah Agung RI

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
	hakim melaksanakan sidang hampir setiap hari dan kerja sampai malam	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.			
2.	Banner Role Model belum dibuat dan dipasang di gedung Pengadilan Agama Bima, meskipun sudah ada SK Role Modelnya	Area I Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Sudah dipesan, namun percetakan lama membuat	Tidak diketahuinya siapa dan bagaimana Sosok Role Model di PA Bima yang dijadikan panutan dalam Pembangunan Zona Integritas	Segera diselesaikan pencetakan dan pemasangan Banner Role Model Tahun 2023

B. BIDANG KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Meliputi sub kinerja;

- a. Pelaksanaan Kinerja Penjaga Keamanan;
- b. Pelaksanaan Kinerja Layanan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c. Pelaksanaan Kinerja Antrian Sidang;
- d. Pelaksanaan Kinerja Layanan Resepsionis,
- e. Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang Menunjang Pelayanan Publik;
- f. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan Kerapian dalam pelayanan publik
- g. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan pelayanan publik.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Penjaga keamanan masih kurang tegas terhadap keluar masuknya para pihak dan sering kehilangan Id card para pihak.	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam	Kurang ada kemampuan dan kedisiplinan pihak keamanan	Tidak melaksanakan tugas dengan maksimal	Sering diadakan DDTK untuk meningkatkan profesionalisme keamanan

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
		Lingkungan Pengadilan.			
2.	Kurang lengkapnya brosur persyaratan dari seluruh jenis perkara	Keputusan Dirjen Badilag. Mahkamah Agung RI No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama	Penanggung jawab kurang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan brosur di PTSP	Menurunnya kualitas pelayanan pada PTSP	Brosur di meja Informasi dan Layanan PTSP lainnya untuk dilengkapi

C. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

Meliputi sub kinerja:

- a. Pelaksanaan tatakelola Prosedur penerimaan perkara.
- b. Pelaksanaan tata kelola pencatatan dan pengarsipan dokumen administrasi penerimaan perkara pada layanan Meja Penerimaan (PTSP), baik yang bersifat manual maupun yang dilakukan melalui elektronik dalam aplikasi SIPP;
- c. Pelaksanaan tata kelola administrasi pencatatan dan penginputan dalam pembukuan register, jurnal dan buku-buku lainnya, termasuk tata kelola pelaporan Keuangan Perkara, Biaya Proses dan PNBP baik secara manual terlebih-lebih dalam aplikasi yang telah disediakan (SIPP, e-Register, e-Keuangan, e-PNBP (PNBP Fungsional), dll.);
- d. Pelaksanaan tata kelola pengarsipan perkara, baik yang dilakukan secara manual maupun aplikasi SIPP dan e-Court,
- e. Pelaksanaan Tata Kelola Pelaporan perkara;
- f. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan administrasi perkara.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Ditemukan masih ada lampiran surat Permohonan belum ditandatangani salah satu pihak (Pemohon II)	Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktoral Jenderal Peradilan Agama Tahun 2014	Adanya kelalaian petugas pada PTSP dalam meneliti kelengkapan berkas	Pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan petunjuk teknis Buku II yang menjadi	Sebelum perkara didaftarkan, petugas wajib meneliti kelengkapan

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
	No. Perkara 192/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 21 Februari 2022			standar baku	berkas dan juga membuat lis kelengkapan dan memberi tanda kelengkapan berkas pada list
2.	Tidak lengkapnya persyaratan permohonan Dispensasi Kawin di berkas, namun sudah didaftarkan	Keputusan Dirjen Badilag. Mahkamah Agung RI No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama	Kurangnya kemampuan petugas PTSP dalam memberikan informasi permohonan Dispensasi Kawin	Terhambatnya penyelesaian perkara Dispensasi Kawin	Melengkapi Formulir Syarat Permohonan DK di meja Informasi dan Pendaftaran PTSP dan melaksanakan DDTK ke Petugas PTSP
3.	Terjadi dua kali penginputan data	Keputusan Dirjen Badilag. Mahkamah Agung RI No.	Belum dilakukan upaya	Menghambat administrasi	Petugas IT segera mengintegrasikan

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
	perkara	1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama	mengintegrasikan antara layanan di Posbakum dengan SIPP	pencatatan dan penginputan dalam pembukuan register	SIPP dengan Posbakum
4.	Perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bm sudah BHT dan dilaksanakan isi putusannya, namun belum dilakukan pengarsipan/belum diarsipkan.	Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2014	Sarana tempat penyimpanan arsip kurang luas/sempit, sementara volume perkara banyak	Banyak perkara yang tidak mempunyai tempat penyimpanan	Segera dilakukan pengarsipan terhadap Berkas perkara tersebut

D. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Meliputi sub kinerja:

- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
- b. Pelaksanaan tata kelola persidangan, baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang dilaksanakan;
- c. Pelaksanaan tata kelola dokumen-dokumen hasil pelaksanaan persidangan suatu perkara (dokumen dalam berkas perkara),
- d. Pelaksanaan tata kelola minutasi dan apload dokumen perkara dalam aplikasi SIPP,
- e. Kinerja administrasi dan penyelesaian pelaksanaan putusan (eksekusi);
- f. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan pelaksanaan admionistrasi persidangan.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Perkara Nomor 443/Pdt.G/2022/PA. Bm sudah putus tetapi dokumen BAS di SIPP ada yang belum diinput	Edaran Badilag MA RI tentang Petunjuk penggunaan SIPP	Ketidaktelitian dari Panitera Sidang ketika menginput penundaan dan pengaploadan BAS di SIPP	Ketidaklengkapan data di SIPP	Segera dilengkapi apload dokumen BAS perkara tersebut di SIPP

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
2.	Perkara Nomor 465/Pdr.G/2022/PA/Bm sudah diminutasi dan diarsipkan, namun ada dokumen Mediasi yang belum ditandatangani oleh Mediator	Undang-Undang No. 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.	Ketidaktelitian pejabat untuk menandatangani dokumen tersebut	Masih ada dokumen yang belum ditandatangani yang sudah masuk arsip perkara	Segera melengkapai tandatangan dokumen dari berkas tersebut

E. BIDANG ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

Bidang Administrasi Umum (Kesekretariatan), meliputi:

- a. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Kepegawaian dan ORTALA;
- c. Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Umum dan Keuangan, termasuk tata kelola administrasi keuangan DIPA.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
A. Bidang Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA					
1	Terdapat kekurangan kelengkapan data pegawai a.n Feriman, A.Md pada SIKEP, yaitu pada bagian jabatan salah satu pegawai, nomor SPMT, SPP dan SPMJ belum di input.		Ketidaktelitian	Data pegawai tidak lengkap	Operator SIKEP harus lebih teliti dalam memukhtahirkan data

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
B. Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan					
1.	Belum mengisi Laporan Monitoring, Pemantauan dan Evaluasi melalui Aplikasi e-Monev Bapenas/SMART		Ketidakteitian petugas	Aplikasi e-Monev masih Bapenas masih kosong	Operator harus tepat waktu dalam memutakhirkan data
C. Bidang Umum dan Keuangan					
1.	Masih ada beberapa Barang Milik Negara yang belum dilabelisasi		Kurangnya kontrol dari pejabat terkait	Sulit untuk mengetahui barang-barang yang masih layak atau tidak	Melakukan control keadaan BMN secara rutin tiap awal minggu kerja

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tabel temuan pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Pengadilan Agama Bima dari keempat aspek pengawasan pada Triwulan II Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi temuan tersebut sebagian disebabkan karena kurangnya koordinasi dan pemahaman pelaksana atas sistem kerja yang kedepan harus dilakukan perbaikan.

B. REKOMENDASI

1. Ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas perlu lebih diperhatikan, salah satunya dengan *check* dan *recheck* hasil kerja;
2. Diperlukan koordinasi yang baik antar bagian baik antar sub layanan kepaniteraan dan kesekretariatan, maupun lintas sub antara sub kepaniteraan dengan kesekretariatan sehingga setiap keinerja dan layanan masing-masing mencapai sub bagian terlaksanan dengan maksimal;
3. Terhadap setiap temuan agar dilakukan Monitoring dan evaluasi sehingga rekomendasi perbaikan yang disampaikan Tim dapat telaksana perbaikannya secara benar, tepat dan maksimal.

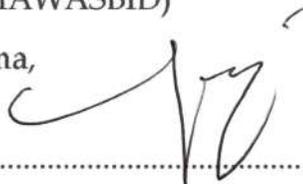
Bima, 27 Juni 2023

Tim Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)

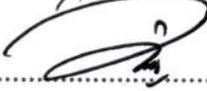
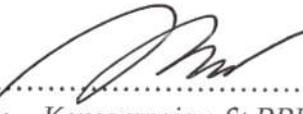
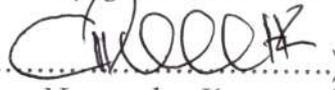
Pengadilan Agama Bima,

1. Abubakar, S.H.

(Hakim Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik)



(.....)

2. Hj. Khafidatul Amanah S.H., M.H. (.....)
(Hakim Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan)
3. Uswatun Hasanah, S.H.I. (.....)
(Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara)
4. Solatiah, S.H.I. (.....)
(Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan - Kepegawaian & PPIT)
5. Dani Haswar, S.H.I., M.H. (.....)
(Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan - Umum dan Keuangan)

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima/
Koordinator Pengawasan,




H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.
NIP. 196904171999031003